

## ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK

Tri Widayati

Fakultas Ekonomi Untag Semarang

Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang

triwiedy3@yahoo.com

### Abstrak

*Kemiskinan di kabupaten Demak ditinjau dari beberapa indikator menunjukkan kondisi yang memerlukan penanganan yang cukup serius. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir (2006-2010) terus menurun, Terjadi ketimpangan antara kota dan desa, dimana Jumlah penduduk miskin di desa sangatlah besar dibanding dengan jumlah penduduk miskin di kota. Persentase Jumlah penduduk miskin di kota hanya sebesar 2% rata-rata pertahun, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin di desa rata-rata pertahun sebesar 20%. Indikator lain yang terkait dengan kemiskinan adalah tingkat pengangguran, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan. Proses percepatan penanggulangan kemiskinan selain dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha juga diharapkan untuk berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Di samping itu kunci keberhasilan PPK adalah membangun keterpaduan langkah dalam perumusan dan penyelenggaraan program pembangunan khususnya PPK. PPK harus dilaksanakan secara sistematis dari penetapan sasaran, perumusan bentuk program serta cara melakukan pemantauan dan evaluasi harus dipikirkan dan dirumuskan dengan matang dan seksama sejak awal.*

*Kata Kunci : Tingkat kemiskinan, indikator, program*

### Abstract

*Demak district poverty in terms of some indicators show conditions that require serious treatment. The number of poor people in Demak regency during the last 5 years (2006-2010) continues to decline, An inequality between urban and rural areas, where the number of poor people in the village is very large compared to the number of poor people in the city. Percentage of poor people in the city by only 2% on average per year, while the percentage of poor people in the rural average of 20% per year. Indicators related to poverty is unemployment, health and education levels. Acceleration of the process in addition to combating poverty by the local government, the business community are also expected to participate through its Corporate Social Responsibility (CSR). In addition, the key to success is to build cohesion PPK step in the formulation and implementation of development programs in particular PPK. KDP should be carried out systematically from goal setting, formulation of program forms and how to perform monitoring and evaluation should be well thought out and carefully formulated and carefully from the beginning.*

*Keywords : Poverty, indicators, program*

### Pendahuluan

Kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensi. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi (rendahnya pendapatan), tetapi juga sosial, budaya, politik, lingkungan dan

hukum. Untuk mengurangi penduduk miskin telah dilakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah, swasta, dan LSM. Beragam program penanggulangan kemiskinan itu ada yang bersifat sektoral oleh pemerintah, LSM dengan program pengembangan masyarakat, sementara swasta lebih dikenal dengan program kemitraannya. Sudah pasti setiap instansi atau lembaga memiliki kriteria mengenai kemiskinan dan memiliki pola kerja/pola pengembangan masing-masing.

Sampai saat ini belum ada kriteria yang baku dalam mengidentifikasi penduduk miskin, pengertian dan kriteria kemiskinan begitu beragam sesuai badan/instansi/dinas yang menangani masalah kemiskinan. Bagi dinas sosial misalnya mereka yang miskin adalah : mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan; mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang termasuk kelompok marginal yang berada di sekitar garis kemiskinan. Disamping itu ukuran kemiskinan lainnya dari BKKBN yaitu berdasarkan kelompok prasejahtera dan sejahtera 1. Kedua kriteria kemiskinan itu adalah paling banyak digunakan dalam menentukan penduduk miskin.

Dalam usaha mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Nyatanya jumlah penduduk miskin tidak pernah hilang sama sekali, oleh karena itu perlu upaya terobosan dalam kerangka percepatan pengentasan kemiskinan yang diwujudkan dalam action plan dan implementasi secara terpadu.

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko,1997:137). Menurut Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin (John Friedman (1979) dalam Ridlo (2001:8)).

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan (Effendi, 1993:201-204). Tinjauan yang sama dengan dengan penjelasan berbeda dikemukakan Nugroho dan Dahuri (2004:165-166). Dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat.

keluarga sejahtera I . Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.

Menurut Rusli dkk (1995:51-52) harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhahan minimum tertentu. Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi kondisi kemiskinan berdasarkan jenis dan lokasinya.
2. Menemukan dan mengenali tipologi latar belakang permasalahan kemiskinan.
3. Melakukan review kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.
4. Menyusun kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan Kabupaten Demak.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui fenomena program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak. Peneliti dalam pandangan fenomenologis menurut Moleong (1994:9) berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Menurut Husserl dalam Muhadjir (2000:17) mengemukakan bahwa objek ilmu itu tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena berupa persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek tentang sesuatu diluar subyek. Sedangkan menurut Mantra (2004:25) fenomenologi menuntut pendekatan holistik, mendudukan objek penelitian dalam suatu konstruksi ganda dan melihat objek dalam konteks natural bukan parsial. Alat Analisis yang digunakan adalah dengan SWOT

### **Hasil Analisis dan Pembahasan**

#### **1. Tingkat Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir (2006-2010) terus menurun. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak sebesar 263.500 jiwa kemudian menurun menjadi 238.900 jiwa di tahun 2007. Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Demak juga berhasil menurunnya jumlah penduduk miskin, sehingga pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak menjadi 217.200 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada tahun 2009 dan 2010, yaitu 202.240 jiwa dan 198.800 jiwa. Artinya persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak rata-rata pertahunnya sebesar 22 %.

Terjadi ketimpangan antara kota dan desa, dimana Jumlah penduduk miskin di desa sangatlah besar dibanding dengan jumlah penduduk miskin di kota. Persentase Jumlah penduduk miskin di kota hanya sebesar 2% rata-rata pertahun, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin di desa rata-rata pertahun sebesar 20%.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) rata-rata pertahun selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Demak sebesar 4 dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) rata-rata pertahun selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Demak sebesar 1. Ini berarti, kemiskinan di Kabupaten Demak masih relatif rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.

**Tabel 1**  
**Indikator Kemiskinan Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2010**

Indikator	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah penduduk miskin	jiwa	263,500	238,900	217,200	202,240	198,800
Jumlah penduduk miskin kota	jiwa	17,031	16,863	16,533	15,891	15,576
Jumlah penduduk miskin desa	jiwa	246,469	222,037	200,667	186,349	183,224
Jumlah penduduk	jiwa	1,043,109	1,073,187	1,076,980	1,063,768	1,058,938
Persentase penduduk miskin	%	26.03	23.50	21.24	19.70	18.76
Persentase penduduk miskin kota	%	1.63	1.57	1.54	1.49	1.47
Persentase penduduk miskin desa	%	23.63	20.69	18.63	17.52	17.30
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		5.09	3.65	3.86	3.68	
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)		1.46	0.85	0.88	1.05	

Sumber : Bappeda Kabupaten Demak, Tahun 2012

## 2. Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun masih fluktuatif. Begitu pula dengan Angkatan kerja yang bekerja selama 5 tahun terakhir ini, juga naik-turun dari tahun ke tahun. Untuk nilai Upah Minimum Kabupaten Demak dari tahun ke tahun terus menerus mengalami peningkatan, di tahun 2010 nilai UMR Kabupaten Demak sebesar Rp. 813.400,- Besarnya nilai UMR di Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir ini, masih di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), walaupun persentase UMR terhadap KHL di Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (lebih dari 90 % di tahun 2009 dan 2010). Akan tetapi hal ini tetap harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan nilai UMR diatas nilai KHL, agar kemiskinan di Kabupaten Demak semakin berkurang. Hal-hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 2

**Tabel 2**  
**Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2010**

Indikator	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah angkatan kerja	Jiwa	549,666	593,581	583,274	524,939	522,266
Angkatan kerja yang bekerja	Jiwa	469,854	525,238	529,853	494,917	492,570
Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT)	Jiwa	61,960	40,154	35,569	30,022	29,696
Upah minimum Kab/Kota	Rp/bulan	500,000.00	581,000.00	647,500.00	772,262.00	813,400.00
Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Rp/bulan	635,077.46	683,444.45	812,908.00	847,282.00	874,214.00
Persentase UMK terhadap KHL	%	78.73	85.01	79.65	91.15	93.04

Sumber : Bappeda Kabupaten Demak Tahun 2012

### 3. Kesehatan

Analisis tingkat kesehatan di Kabupaten Demak, dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, prevalensi balita kekurangan gizi, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan Ante Natal, pelayanan kesehatan dengan pelayanan KB memadai, Balita dengan imunisasi lengkap, jaminan kesehatan penduduk miskin, sumberdaya kesehatan,.

- **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi, selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Demak (2006-2010) masih naik-turun. Artinya selama 5 tahun terakhir angka kematian bayi masih fluktuasi. Pada tahun 2007 jumlah angka kematian bayi menurun dari tahun sebelumnya (2006), dimana per 1000 kelahiran hidup hanya 6.05 bayi yang lahir mati. Kemudian tahun 2008 juga mengalami penurunan angka kematian bayi sebesar 0,85. Dimana pada tahun 2008 angka kematian bayi sebesar 5.20 dari 1000 kelahiran hidup. Akan tetapi pada tahun 2008 dan 2009 jumlah angka kematian bayi mengalami kenaikan. Tahun 2009 terjadi kenaikan angka kematian bayi sebesar 0.40 dan pada tahun 2010 terjadi pertambahan jumlah angka kematian bayi sebesar 0.90, dimana pada tahun 2009 jumlah angka kematian bayi menjadi 6.50 dari 1000 kelahiran hidup. Selama 5 tahun terakhir rata-rata angka kematian bayi pertahun di Kabupaten Demak sebesar 5.94 dari 1000 kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup bayi di Kabupaten Demak terus mengalami penurunan. Secara rata-rata dilihat dari angka kematian bayi yang terjadi, Kabupaten Demak angka kematian bayi tiap tahun selama 5 tahun terakhir cukup rendah, kurang dari 7% dari 1000 kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3**  
**Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2010**

Indikator	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
Angka Kematian Bayi	1.000 kelahiran hidup	6.57	6.05	5.20	5.60	6.50
<b>Kenaikan/Penurunan</b>			<b>(0.52)</b>	<b>(0.85)</b>	<b>0.40</b>	<b>0.90</b>
Jumlah Kematian bayi (< 1 tahun)	Jiwa		145	123	102	115
Jumlah Kelahiran Hidup	Kelahiran		23,976	23,077	22,368	21,216

*Sumber : Bappeda Kabupaten Demak, Tahun 2012*

- **Angka Kematian Balita**

Angka kematian balita (< 5 tahun) juga masih naik turun dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah angka kematian balita di Kabupaten Demak sebesar 0.56 dari 1000 kelahiran hidup. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0.31. Pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan 0.11 angka kematian balita dari 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2009 jumlah angka kematian balita Kabupaten Demak sebesar 0.67 dan pada tahun 2010 mengalami penurunan 0.43 angka kematian balita, dimana dari 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita di Kabupaten Demak pada tahun 2010 adalah 0.24.

Proporsi jumlah angka kematian balita dari jumlah kelahiran hidup sangat kecil. Dari jumlah kelahiran hidup yang sangat besar, jumlah kematian balita sangatlah rendah. Sebagai contoh

pada tahun 2009 jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Demak sebesar 22,368 dan angka kematian balita sangat kecil yaitu 15 jiwa. Begitu pula pada tahun 2010 jumlah angka kematian balita adalah 5 jiwa, sedangkan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Demak pada tahun 2010 sebesar 21,216. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, angka kematian balita di Kabupaten Demak sangatlah rendah, karena tiap tahunnya berkisar kurang dari 1% per 1000 kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4. berikut ini.

**Tabel 4**  
**Angka Kematian Balita Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2010**

Indikator	Satuan	2007	2008	2009	2010
Angka Kematian Balita	1.000 kelahiran hidup	0.25	0.56	0.67	0.24
<b>Kenaikan/Penurunan</b>			<b>0.31</b>	<b>0.11</b>	<b>(0.43)</b>
Jumlah Kematian Balita (< 5 tahun)	Jiwa	6	13	15	5
Jumlah Kelahiran Hidup	100,000 Kelahir an	23,976	23,077	22,368	21,216

Sumber : Bappeda Kabupaten Demak, Tahun 2012

## Analisis dan Pembahasan

### Analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak

Strategi pengentasan kemiskinan didekati dengan analisis SWOT, dimana identifikasi berbagai faktor secara sistematis digunakan untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal yaitu Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan Faktor Internal yaitu Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*).

Dengan memperlihatkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka dapat disusun analisis SWOT yang menjadi arahan penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Matriks Analisis SWOT Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Demak Terhadap Rencana Strategis**

IFE	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Otonomi daerah yang berdampak pada peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.</li> <li>Adanya program jaminan kesehatan penduduk miskin.</li> <li>PDRB perkapita yang cenderung meningkat dengan inflasi yang cenderung menurun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga tingkat kemiskinan di desa jauh lebih besar dari pada di kota.</li> <li>Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.</li> <li>Peranan masyarakat masih rendah.</li> </ol>

<p><b>EFE</b></p>	<p>4. Potensi pariwisata, pertanian, dan perikanan yang besar di kabupaten Demak.</p> <p>5. Posisi Kabupaten Demak yang dekat dengan Semarang.</p> <p>6. Potensi sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan ekonomi lokal.</p>	
<p><b>Peluang</b></p> <p>1. Pemanfaatan basis data terpadu yang memuat 40 % rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah lengkap dengan by name by adressm, sehingga program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dengan tingkat kesalahan minimum dan manfaat maksimum.</p> <p>2. Adanya tim percepatan penanggulangan kemiskinan.</p> <p>3. Pemanfaatan dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh).</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>1. Program berbasis individu, keluarga atau rumah tangga, dengan tujuan melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.</p> <p>2. Adanya program keluarga Harapan (PKH)</p> <p>3. Adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).</p> <p>4. Peningkatan Program beras untuk keluarga miskin (Raskin)</p> <p>5. Adanya program beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin (BSM)</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>1. Program pemberdayaan kelompok masyarakat di perdesaan dengan tujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam penanggulangan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Misalnya peningkatan peranan PNPMM Mandiri di perdesaan.</p> <p>2. Program pemberian keterampilan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai aksi CSR kepada masyarakat. Sehingga diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan-perusahaan menengah atau besar.</p>
<p>4. Program CSR dari perusahaan-perusahaan.</p> <p>5. Adanya program wajib belajar 9 tahun dan adanya wacana baru program wajib belajar 12 tahun.</p>	<p>6. Program peningkatan masyarakat di bidang pertanian dan perikanan yang banyak terjadi di perdesaan.</p> <p>7. Penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.</p> <p>8. Program penguatan stabilitas harga agar tingkat inflasi dapat terkendali.</p> <p>9. Program pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Demak.</p>	<p>3. Koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.</p>
<p><b>Ancaman</b></p> <p>1. Upah minimum regional (UMR) dibawah kebutuhan hidup layak (KHL).</p> <p>2. Kebocoran dana (korupsi) yang luar biasa.</p> <p>3. Perkembangan penurunan kemiskinan yang</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>1. Penetapan UMR diatas KHL, di era otonomi daerah.</p> <p>2. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Dengan tujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha</p>	<p><b>Stategi WT</b></p> <p>1. Program pemberian bantuan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mengurangi tingkat kemiskinan</p> <p>2. Pemantauan pelaksanaan</p>

<p>cenderung melambat.</p>	<p>berskala mikro dan kecil. 3. Adanya program untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.</p>	<p>program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD terkait. 3. Penggunaan basis data terpadu secara terintegrasi akan menciptakan adanya sinkronisasi antar program sehingga rumah tangga / keluarga sangat miskin penerima PKH akan mendapat semua program bantuan sosial yang seharusnya mereka terima. 4. Program peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan sumberdaya manusia. 5. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, bawah lima tahun (Balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM / Keluarga Sangat Miskin (KSM).</p>
----------------------------	--	--

### Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster, yaitu :

1. Klaster 1 berbasis individu, keluarga atau rumah tangga, dengan tujuan melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program nasional tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminas Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin (BSM).
2. Klaster 2 berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat, dengan tujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam kelompok ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3. Klaster 3 berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dengan tujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program nasional dalam kelompok ini adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).



4. Program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dari sisi kelembagaan, Perpres tersebut juga mengamanatkan penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah. Yaitu melalui rekomendasi pembentukan Tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat; dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga-lembaga ini diarahkan untuk dapat bekerjasama satu sama lain dalam meningkatkan kualitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, untuk lebih menjamin efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu fungsi TKPK dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan kegiatan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD terkait.

Dalam kendali TKPK, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD terkait diharapkan dapat diperoleh secara berkala informasi tentang kinerja realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap program. Dengan demikian TKPK dapat berperan membantu perbaikan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Di samping itu, hasil pemantauan dapat berguna bagi daerah yang bersangkutan dalam menentukan intervensi kebijakan daerah untuk mendukung efektivitas program yang sedang berjalan.

Program penanggulangan kemiskinan klaster pertama adalah satu, Program Keluarga Harapan (PKH), lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)*. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH.
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH.
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Proses percepatan penanggulangan kemiskinan selain dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha juga diharapkan untuk berpartisipasi melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Di samping itu kunci keberhasilan PPK adalah membangun keterpaduan langkah dalam perumusan dan penyelenggaraan program pembangunan khususnya PPK. PPK harus dilaksanakan secara sistematis dari penetapan sasaran, perumusan bentuk program serta cara melakukan pemantauan dan evaluasi harus dipikirkan dan dirumuskan dengan matang dan seksama sejak awal.

### **Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak**

Untuk mewujudkan visi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Demak, terkait dengan penanggulangan kemiskinan, misi yang akan dilakukan antara lain :

1. Pencegahan pewarisan kemiskinan dan advokasi keluarga miskin
2. Pencegahan munculnya keluarga miskin baru
3. Pengentasan keluarga miskin

4. Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan
5. Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat
6. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan demokratis dalam rangka pelayanan prima
7. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah
8. Memacu investasi dan pengembangan industry dan perdagangan yang didukung pertanian, kelautan dan pariwisata
9. Mewujudkan masyarakat madani yang bermartabat, demokratis, dan sejahtera
10. Membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar terDemaki, mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta mengutamakan pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan koperasi.
11. Mewujudkan sistem social politik yang demokratis dan tata pemerintahan yang baik serta pemerintahan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
12. Mewujudkan kemitraan yang sinergis untuk menanggulangi kemiskinan oleh seluruh stakeholders yaitu institusi pemerintah (Pusat dan Daerah), Lembaga Legislatif, LSM, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya (termasuk kelompok masyarakat miskin).
13. Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat miskin dalam kehidupan social dan ekonomi serta memperoleh kebijakan public yang tidak diskriminatif.
14. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik.
15. Meningkatkan kapasitas penduduk miskin melalui peningkatan pelayanan bagi kebutuhan dasar dan peningkatan ketrampilan.
16. Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rentan.
17. Menerapkan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan kemiskinan.
18. Mendukung tersusunnya tatanan penanggulangan kemiskinan yang partisipatif, bertanggungjawab, terukur, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan.
19. Melakukan artikulasi, agregasi dan evaluasi terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ada.
20. Melakukan usaha untuk mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh stakeholders Kabupaten Demak.
21. Memperkokoh kemandirian masyarakat dengan melakukan upaya pengurangan belanja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

## **Penutup**

Kemiskinan, apapun indikatornya memerlukan penanganan yang terencana, komprehensif dan terkoordinir. Banyak program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran atau bahkan hanya bersifat partial dan sementara.

### **Daftar Pustaka**

Ade Cahyat, Bagaimana Kemiskinan Diukur ?, Center for International Forestry Research, November 2004, Number 2.

Asian Development Bank, Meningkatkan Perjuangan Melawan Kemiskinan di Asia Pasifik, Juni 2005

The World Bank, Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, November 2006

Departemen Sosial Republik Indonesia, Kemiskinan dan Efektifitas BLT, 2006

Irawan dan Suparmoko. 1992. Ekonomika Pembangunan. BPFE Yogyakarta

Undang-undang No 13 tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin

Peraturan Presiden RI no 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Demak 2011-2016